

KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI SEKTOR PARIWISATA

CONTRIBUTION REGIONAL TAX AND RETRIBUTIONS IN THE TOURISM SECTOR

Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda*, Frida Fanani Rohma

Prodi Akuntansi, FEB, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan

*Koresponden email: nusri.leapatra@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi peranan pajak dan retribusi daerah sektor pariwisata. Peranan ditinjau dari analisis kontribusi dan efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Madura, khususnya pada kabupaten Bangkalan pada tahun 2017-2021. Metode penelitian menggunakan kualitatif interpretif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, verifikasi dan keabsahan data dengan triangulasi informasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa analisis kontribusi dan efektivitas pada pajak dan retribusi daerah sektor pariwisata kabupaten Bangkalan selama tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi. Adanya pandemi covid-19 juga turut berdampak terhadap penurunan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Mengembangkan sektor pariwisata juga tidak luput dari tantangan dan berbagai upaya yang dilakukan pelaku sektor pariwisata. Pemerintah daerah membutuhkan upaya dan strategi maksimal untuk dapat mengoptimalkan dan meningkatkan PAD. Hal ini diperlukan kerjasama dan komitmen antara pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensial daerah masing-masing.

Kata kunci: Pajak daerah, retribusi daerah, sektor pariwisata, PAD

ABSTRACT

This study aims to analyze and explore the role of regional taxes and fees in the tourism sector. The role is viewed from an analysis of the contribution and effectiveness of Regional Original Income (PAD) in the Madura region, especially in the Bangkalan district during 2017-2021. The research method uses interpretive qualitative with a case study approach. Data analysis was carried out using data reduction techniques, data verification and validity using information triangulation. The research findings show that the contribution and effectiveness of local taxes and fees on the tourism sector in Bangkalan district during 2017-2021 tends to fluctuate. The existence of the Covid-19 pandemic also contributed to a decrease in the realization of regional tax and retribution revenues. Developing the tourism sector is also not free from challenges and various efforts made by tourism sector actors. Local governments need maximum efforts and strategies to be able to optimize and increase PAD. This requires cooperation and commitment between the government and the community in optimizing the potential of each area.

Keywords: Local tax, regional retribution, tourism sector, PAD

PENDAHULUAN

Pendekatan kooperatif oleh otoritas pajak perlu dimaksimalkan secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak (Sigle et al, 2022). Mengoptimalkan kepatuhan pajak masih menjadi rintangan di beberapa negara (Barrios et al, 2020), tak terkecuali di Indonesia. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak diharapkan turut serta meningkatkan penerimaan pajak, yang berujung pada meningkatnya pendapatan negara dan juga daerah. Pendapatan suatu daerah berbeda-beda, ditinjau dari seberapa besar kekayaan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut dan optimalisasi pengelolaannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain yang sah (UU No. 33

Tahun 2004). Pengelolaan sumber-sumber PAD dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sektor basis yang ada di daerah tersebut. PAD menjadi salah satu indikator dari kemandirian otonomi daerah dalam menggali potensi untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan. Semakin besar PAD maka dinilai semakin tinggi kemandirian daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan (Dewi & Adi, 2021).

Sektor basis menunjukkan bahwa sektor yang potensial untuk dikembangkan guna mendukung pertumbuhan perekonomian suatu wilayah (Tarigan, 2005). Adanya sektor basis di suatu daerah dapat memberikan keuntungan pada arus perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pariwisata merupakan salah satu sektor basis yang dapat dimaksimalkan. Kristianti & Bala (2019) menyatakan bahwa Toraja Utara

dalam mengelola sektor pariwisata oleh pemerintah berjalan dengan baik. Hal berbeda ditunjukkan penelitian Yanti & Hadya (2018), yang menyatakan bahwa kontribusi pendapatan objek wisata terhadap PAD kota Padang mengalami fluktuasi dari tahun 2013-2017.

Pariwisata merupakan salah satu sektor penunjang pendapatan suatu daerah. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah guna meningkatkan pendapatan sekaligus memaksimalkan potensi di daerah tersebut. Alasan utama pentingnya sektor pariwisata dikembangkan secara berkeanjutan adalah untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan masuknya devisa bagi daerah dan negara, peningkatan dan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Pariwisata juga mendorong proses perlindungan terhadap suatu lingkaran fisik maupun sosial budaya dari masyarakat setempat, karena hal tersebut merupakan aset yang dapat dijual kepada wisatawan dan jika ingin berlanjut maka harus di pertahankan (Ahmar et al., 2012). Sejak tahun 1978 pemerintah terus berusaha mengembangkan kepariwisataan di Indonesia. Pariwisata perlu ditingkatkan dan diperluas untuk meningkatkan penerimaan devisa, dan memperkenalkan kebudayaan (TAP MPR No. IV/MPR/1978). Bentuk lain dari keseriusan pengembangan kepariwisataan diseluruh wilayah Indonesia oleh pemerintah yaitu dengan membuat Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan.

Salah satu regulasi terkait pariwisata yakni Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pariwisata diartikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah daerah. Pariwisata merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi karena sektor pariwisata memiliki keterkaitan pada hampir semua subsektor ekonomi (Puspitasari et al., 2018). Setiap daerah memiliki potensi sektor pariwisata yang beragam. Seperti halnya pada Kabupaten Kuningan, yang memiliki strategi untuk mengembangkan sektor pariwisatanya yaitu salah satunya dengan meluncurkan konsep *city branding* sebagai ikon pariwisata yang khas (Masruroh & Nurhayati, 2016). Namun penelitian Ernawaty (2019) menunjukkan bahwa tantangan pengembangan wisata adalah faktor dana/anggaran hingga kurang optimalnya sumber daya manusia.

Disamping itu, penelitian Nawangsih (2018) menyatakan bahwa kontribusi retribusi sektor pariwisata dalam PAD Kabupaten Purworejo tahun

2010- 2016 tergolong rendah sebesar 0,38%-0,96%. Berbeda halnya dengan penelitian Puspitasari et al., (2018) yang menyatakan bahwa kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi, hal ini menunjukkan bahwa sumbangan sektor pariwisata terhadap PAD di Kota Batu pengaruhnya naik turun tapi cenderung turun sehingga perlu dilakukan pengembangan yang lebih baik lagi. Penelitian Wulandari & Priyastiyi (2022) menyatakan bahwa kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021 menunjukkan hasil yang tidak stabil serta tidak memiliki kontribusi yang terlalu besar yakni kurang dari 10 %. Sejalan dengan penelitian Wicaksono et al (2022) yang menyatakan bahwa secara umum penerimaan pajak daerah kabupaten Banyuwangi belum dapat optimal sebagaimana mestinya akibat adanya pandemi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis optimalisasi sektor pariwisata ditinjau dari segi analisis kontribusi dan efektivitas pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD, khususnya pada kabupaten Bangkalan tahun 2017-2021. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini juga mengeksplorasi tentang tantangan dan strategi dalam pengembangan sektor pariwisata di masa pandemi Covid-19. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam rangka mengoptimalkan program kepariwisataan guna meningkatkan PAD.

METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif interpretif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena bertujuan mendapatkan “kedalaman” pemahaman tentang peranan pajak dan retribusi daerah sektor pariwisata. Peranan ditinjau dari analisis kontribusi dan efektivitas pajak dan retribusi daerah sektor pariwisata terhadap PAD kabupaten Bangkalan tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena bertujuan menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Creswell, 2014). Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Data primer bersumber dari hasil wawancara dengan informan. Terdapat 2 informan (Bapak A dan Bapak T) yang merupakan salah satu pengelola

tempat wisata di wilayah Madura. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa LKPD Kabupaten Bangkalan tahun 2017-2021. Laporan tersebut digunakan untuk menganalisis tingkat kontribusi dan efektifitas pajak dan retribusi daerah sektor pariwisata. Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan berikut (Barlian, 2016): 1) Observasi, yang dilakukan terhadap semua aspek. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati aktivitas informan di lokasi penelitian. 2) Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan, dilakukan secara semi terstruktur dan bersifat terbuka, yang dirancang untuk memunculkan pandangan dari informan. 3) Dokumentasi. Metode dokumentasi umumnya digunakan untuk melakukan penelitian sosial dengan melakukan penelusuran atas data historis.

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian (Creswell, 2014). Teknis analisis data penelitian ini terdiri atas: 1) Reduksi data, berarti penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. 2) Langkah selanjutnya penyajian data. Data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif. Bertujuan mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan.

Analisis rasio kontribusi digunakan untuk mengidentifikasi seberapa besar peran setiap jenis pajak yang dipungut Bapenda sebagai komponen penyusun PAD. Analisis rasio efektifitas bertujuan untuk mengidentifikasi efektifitas Bapenda dalam melakukan pemungutan setiap jenis pajak.

$$\text{Nilai Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{Nilai Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Tabel 1. Kategori Kontribusi

Tingkat Kontribusi	Kriteria Kontribusi
0%-0,9%	Relatif Tidak Berkontribusi
1%-1,9%	Kurang Berkontribusi
2%-2,9%	Cukup Berkontribusi
3%-3,9%	Memiliki Kontribusi
>4%	Sangat Memiliki Kontribusi

Sumber: Harumdani, 2012

Tabel 2. Klasifikasi Tingkat Efektivitas

Persentase	Klasifikasi
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
>60%	Tidak Efektif

Sumber: Firdausy, 2017

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Sektor Pariwisata terhadap PAD

Beragamnya pendapatan suatu daerah dipengaruhi oleh seberapa besar kekayaan sumber daya yang dimiliki dan optimalisasi pengelolannya. Pengelolaan sumber PAD dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sektor basis yang ada di daerah tersebut, salah satunya pada sektor pariwisata. Penggunaan analisis kontribusi bertujuan untuk mengeksplorasi seberapa besar sumbangan kontribusi sektor pariwisata yang bersumber dari: 1) Pajak daerah sektor pariwisata, meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan; dan 2) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap PAD di Kabupaten Bangkalan tahun 2017-2021.

Fenomena semakin menarik ketika pada awal tahun 2020 Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang diduga turut memberikan dampak pada sektor pariwisata. Dengan dilakukannya analisis kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah sektor pariwisata terhadap PAD, pada akhirnya diharapkan dapat memberikan gambaran apakah adanya pandemi Covid-19 benar-benar menyebabkan penurunan kontribusi atau tidak. Analisis kontribusi dihitung dengan membandingkan realisasi total penerimaan sektor pariwisata dengan total realisasi PAD untuk kemudian dikategorisasikan berdasarkan teori dari Harumdani (2012). Tabel 3 menyajikan informasi jumlah target dan realisasi PAD di Kabupaten Bangkalan untuk Tahun Anggaran 2017-2021.

Tabel 3. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	303.497.493.139,14	325.525.663.295,62
2018	225.239.028.383,40	199.258.427.616,41
2019	244.180.072.574,56	262.258.214.631,49
2020	211.620.744.167,24	233.177.792.497,49
2021	202.795.570.271,00	271.656.642.591,09

Sumber: LKPD, 2017-2021

Potensi tiap daerah berbeda-beda dan sangat penting untuk diptimalkan, guna meningkatkan PAD. PAD menjadi salah satu indikator dari kemandirian otonomi daerah dalam menggali potensi untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan. Semakin besar pendapatan asli daerah maka dinilai semakin mandiri daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan (Dewi & Adi, 2021). Tabel 3 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD cenderung meningkat, meski di tahun 2018 tidak melampaui target. Dengan menggunakan rumus analisis kontribusi, berikut perhitungan dan kategori kontribusi yang dihasilkan sektor pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2017-2021:

Tabel 4. Pajak Restoran Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2017	2.573.725.809,64	0,79	Relatif Tidak Berkontribusi
2018	3.240.275.275,00	1,63	Kurang Berkontribusi
2019	3.681.484.594,50	1,40	Kurang Berkontribusi
2020	3.257.300.041,16	1,40	Kurang Berkontribusi
2021	2.854.127.601,00	1,05	Kurang Berkontribusi
	Rata-rata	1,25	Kurang Berkontribusi

Sumber: LKPD, 2017-2021 (diolah)

Tabel 5. Pajak Hotel Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2017	82.490.000,00	0,03	Relatif Tidak Berkontribusi
2018	87.301.600,00	0,04	Relatif Tidak Berkontribusi
2019	87.180.400,00	0,03	Relatif Tidak Berkontribusi
2020	68.636.249,00	0,03	Relatif Tidak Berkontribusi
2021	57.907.417,00	0,02	Relatif Tidak Berkontribusi
	Rata-rata	0,03	Relatif Tidak Berkontribusi

Sumber: LKPD, 2017-2021 (diolah)

Tabel 6. Pajak Hiburan Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2017	151.704.375	0,05	Relatif Tidak Berkontribusi
2018	118.606.850	0,06	Relatif Tidak Berkontribusi
2019	160.484.375	0,06	Relatif Tidak Berkontribusi
2020	95.980.250	0,04	Relatif Tidak Berkontribusi
2021	15.501.640	0,01	Relatif Tidak Berkontribusi
	Rata-rata	0,04	Relatif Tidak Berkontribusi

Sumber: LKPD, 2017-2021 (diolah)

Tabel 7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2017	282.219.500	0,09	Relatif Tidak Berkontribusi
2018	642.435.728	0,32	Relatif Tidak Berkontribusi
2019	383.006.500	0,15	Relatif Tidak Berkontribusi
2020	86.258.500	0,04	Relatif Tidak Berkontribusi
2021	86.718.000	0,03	Relatif Tidak Berkontribusi
	Rata-rata	0,12	Relatif Tidak Berkontribusi

Sumber: LKPD Kabupaten Bangkalan, 2017-2021 (diolah)

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi. Seperti tersaji pada tabel 4, terjadi kenaikan pada tahun 2018, konstan pada tahun 2019 dan 2020, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2021. Kontribusi pajak restoran tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 1,63% (dikategorikan ke dalam kurang berkontribusi). Selama pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019-2020, hasil analisis kontribusi pajak restoran cenderung konstan dan terjadi penurunan sebesar 0,23% jika dibandingkan tahun 2018. Setelah pandemi berakhir, justru semakin turun menjadi 1,05%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pandemi Covid-19 turut memberikan dampak atas kontribusi pajak restoran terhadap PAD. Pajak restoran menjadi salah satu jenis pajak yang memberikan hasil memuaskan dibanding jenis pajak yang lain. Walaupun dalam situasi pandemi Covid-19, namun penerimaan pajak restoran selalu memenuhi target dalam lima tahun terakhir. Faktor utama yang mempengaruhi hasil ini adalah peningkatan minat masyarakat kabupaten Bangkalan untuk berburu kuliner secara *online* serta dibukanya restoran dan warung baru di sekitar akses Jembatan Suramadu.

Disisi lain, tabel 5 juga menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD pada tahun 2017-2021 berfluktuasi. Tahun 2018 menjadi tahun penyumbang kontribusi pajak hotel terbesar selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 0,04% (yang berada dalam kategori relatif tidak berkontribusi). Terjadi penurunan pada tahun 2019 dan 2020 dengan nilai kontribusi yang sama, yakni sebesar 0,03% sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Diberlakukannya PPKM level 4 di kabupaten Bangkalan memberikan dampak terhadap penurunan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang menginap di hotel. Kondisi tersebut menyebabkan penerimaan pajak hotel terus menurun, hingga puncaknya pada tahun 2021 pajak hotel hanya mampu menyumbang kontribusi sebesar

0,02% (dikategorikan sebagai relatif tidak berkontribusi). Selain karena disebabkan adanya pandemi Covid-19, tentunya terdapat faktor lain yang menyebabkan kontribusi pajak hotel menurun hingga tahun 2021. Pemerintah daerah setempat perlu upaya yang lebih dan bersinergi dengan pihak lain guna meningkatkan PAD dari sektor pajak hotel.

Membahas sektor pariwisata selain pajak restoran dan pajak hotel, juga erat kaitannya dengan pajak hiburan. Tersaji pada tabel 6, kontribusi pajak hiburan terhadap PAD pada tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi. Kontribusi pajak hiburan terhadap PAD terbesar terjadi pada tahun 2018 dan 2019 dengan nilai yang sama, yakni sebesar 0,06% dan termasuk ke dalam kategori relatif tidak berkontribusi. Hasil terendah justru terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 0,01% dan termasuk ke dalam kategori relatif tidak berkontribusi. Penyebab utama terus terjadi penurunan setiap tahun adalah diterapkannya PPKM level 4 di kabupaten Bangkalan, sehingga pemerintah daerah melarang masyarakat untuk berkumpul dan diberlakukannya jam malam.

Selain itu, perhitungan pada tabel 7 menunjukkan informasi kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap PAD pada tahun 2017-2021 juga cenderung berfluktuasi. Kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap PAD tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,32% dan berada dalam kategori relatif tidak berkontribusi. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2021 setelah pandemi Covid-19, yaitu sebesar 0,03% dan juga berada dalam kategori relatif tidak berkontribusi. Secara umum, kontribusi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Bangkalan cenderung menurun. Selain itu, rata-rata kontribusi pajak daerah sektor pariwisata dalam rentang waktu 2017-2021 sebesar 1,3% (kurang berkontribusi). Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 turut memberikan dampak yang signifikan, bahkan disaat pandemi Covid-19 mulai membaik di tahun 2021.

Tabel 1. Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2021

Pajak Daerah Sektor Pariwisata	Rata-rata Kontribusi (%)	Kriteria
Pajak Restoran	1,25	Kurang Berkontribusi
Pajak Hotel	0,03	Relatif Tidak Berkontribusi
Pajak Hiburan	0,04	Relatif Tidak Berkontribusi
Rata-rata Pajak Daerah Sektor Pariwisata	1,30	Kurang Berkontribusi

Sumber: LKPD Kabupaten Bangkalan, 2017-2021 (diolah)

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Sektor Pariwisata

Kegiatan perekonomian dan sosial di Bangkalan mulai berkembang pesat sejak diresmikannya Jembatan Suramadu sebagai penghubung mobilitas masyarakat sekitar Surabaya-Madura yang dipisahkan oleh Selat Madura. Menjadi gerbang utama yang menghubungkan Pulau Madura, menjadikan kabupaten Bangkalan juga kaya akan destinasi wisata alam, religi, sejarah, dan kuliner. Ditinjau dari kacamata topografi, terdapat beberapa wilayah kabupaten Bangkalan yang berada di sepanjang pesisir pantai. Adanya potensi tersebut menjadikan pemerintah daerah senantiasa berupaya untuk mengoptimalkan sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan utama.

Tabel 8. Efektivitas Penerimaan Sektor Pariwisata Kabupaten Bangkalan

Tahun	Jenis Penerimaan	Penerimaan Sektor Pariwisata		Efektivitas (%)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2017	Pajak Restoran	1,600,411,590.00	2,573,725,809.64	160.82
	Pajak Hotel	52,800,000.00	82,490,000.00	156.23
	Pajak Hiburan	112,500,000.00	151,704,375.00	134.85
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	162,340,000.00	282,219,500.00	173.84
	Rata-rata			156.44
2018	Pajak Restoran	2,238,000,000.00	3,240,275,275.00	144.78
	Pajak Hotel	53,000,000.00	87,301,600.00	164.72
	Pajak Hiburan	112,500,000.00	118,606,850.00	105.43
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	193,840,000.00	642,435,728.00	304.12
	Rata-rata			179.76
2019	Pajak Restoran	2,628,353,000.00	3,681,484,594.50	140.07
	Pajak Hotel	80,000,000.00	87,180,400.00	108.98
	Pajak Hiburan	113,250,000.00	160,484,375.00	141.71
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	193,840,000.00	383,006,500.00	197.59
	Rata-rata			147.09
2020	Pajak Restoran	2,418,000,000.00	3,257,300,041.16	134.71
	Pajak Hotel	60,000,000.00	68,636,249.00	114.39
	Pajak Hiburan	103,250,000.00	95,980,250.00	92.96
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	77,171,000.00	86,258,500.00	111.78
	Rata-rata			113.46
2021	Pajak Restoran	2,289,000,000.00	2,854,127,601.00	124.69
	Pajak Hotel	100,000,000.00	57,907,417.00	57.91
	Pajak Hiburan	35,000,000.00	15,501,640.00	44.29
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	170,500,000.00	86,718,000.00	50.86
	Rata-rata			69.44

Sumber: LKPD Kabupaten Bangkalan, 2017-2021 (diolah)

Efektivitas pemungutan setiap jenis penerimaan sektor pariwisata di kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah tersaji pada tabel 8. Peran dari pihak berwajib sangat diperlukan dan menjadi faktor yang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak dan retribusi daerah. Efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan sektor pariwisata dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar efektivitas pemungutan, maka akan

semakin mencerminkan upaya Bapenda dalam meningkatkan penerimaan sektor pariwisata. Rata-rata efektivitas penerimaan sektor pariwisata Kabupaten Bangkalan tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif. Terdapat kenaikan dan penurunan yang sangat signifikan. Rata-rata efektivitas penerimaan sektor pariwisata tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 179,76% (sangat efektif). Terjadi penurunan pada tahun 2019 akibat dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada akhir tahun tersebut. Krisis perekonomian akibat pandemi yang terus berlanjut semakin memicu turunnya penerimaan sektor pariwisata di kabupaten Bangkalan secara signifikan, sehingga pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah hanya mampu mencapai rata-rata efektivitas pemungutan sebesar 69,44% (kurang efektif). Penyebab utama penurunan adalah realisasi penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang tidak memenuhi target yang ditetapkan selama pandemi Covid-19 terjadi.

Labuhan Mangrove Education Park merupakan salah destinasi wisata alam kabupaten Bangkalan. Menawarkan pesona alam hutan mangrove, menjadikan Labuhan Mangrove Education Park sebagai destinasi wisata cocok untuk melakukan piknik keluarga dan objek penelitian bagi para akademisi. Destinasi wisata ini juga menyediakan berbagai spot menarik, misalnya wahana bermain untuk anak-anak dan penginapan. Penanaman mangrove mulai dilakukan pada tahun 2014, sehingga pada tahun 2016 tempat wisata tersebut sudah mulai dibuka untuk masyarakat umum. Labuhan mangrove education park ini masih digolongkan sebagai destinasi wisata yang berada pada tahap berkembang. Baik proses pendataan pengunjung, pemberian karcis, hingga pembayaran masih dilakukan manual oleh pihak pengelola wisata tersebut. Oleh karena itu, beberapa data kurang teradministrasi dengan baik.

Salah satu harapan pengelola wisata adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Namun, terjadi penurunan kunjungan wisatawan yang sangat signifikan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Bahkan penurunan tersebut masih berlanjut setelah pandemi Covid-19 usai. Sebelum pandemi Covid-19, labuhan mangrove education park mampu menerima lebih dari 300 kunjungan wisatawan domestik tiap harinya. Namun akibat pandemi Covid-19, tercatat kurang dari 10 wisatawan yang melakukan kunjungan tiap harinya.

Penurunan kunjungan wisatawan menyebabkan pemasukan/penerimaan wisata juga turut menurun. Selain itu, penurunan kunjungan wisata juga

dapat disebabkan munculnya pesaing (seperti tempat wisata baru dan rumah makan). Pengelola wisata perlu meningkatkan inovasi dalam mengembangkan tempat wisata misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana di wisata tersebut. Tentunya hal ini dapat terwujud dengan dukungan dari pihak-pihak terkait. Alasan tidak stabilnya penerimaan daerah, khususnya sektor pariwisata selama pandemi Covid-19 terjadi. Tidak heran jika penurunan kunjungan wisatawan dan pemasukan/penerimaan objek wisata tersebut memberi dampak terhadap penurunan realisasi penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan yang turut berpengaruh terhadap penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebelum pandemi pada tahun 2019, realisasi PAD Kabupaten Bangkalan tercatat sebesar Rp 262.258.214.631,49. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 233.177.792.497,49.

Salah satu destinasi wisata lain di wilayah Madura yang terdampak pandemi Covid-19 di kabupaten Pamekasan adalah Eduwisata Garam. Pengembangan eduwisata garam diharapkan mampu menghidupkan perekonomian masyarakat desa, khususnya para petani garam. Kegiatan eduwisata akan lebih berfokus kepada pemberian sarana edukasi kepada pengunjung terkait pengolahan dan pemanfaatan garam. Mulai dibuka kembali untuk umum pada tanggal 4 April 2021, Eduwisata Garam Pamekasan disambut oleh rasa antusias dari banyak pengunjung pada saat *soft opening*. Namun keadaan berubah drastis ketika varian terbaru virus *corona*, yaitu *omicron* mulai ditemukan di Indonesia.

Dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata, khususnya Eduwisata Garam Pamekasan. Sudah terbukti bahwa jumlah kunjungan yang menurun dan penutupan sementara destinasi wisata turut menyebabkan penurunan penerimaan pajak daerah. Masih mampu mempertahankan destinasi wisata saja sudah menjadi kabar baik bagi pihak pengelola. Sumber daya manusia juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberlanjutan usaha. Ketidakmampuan pengelola untuk menggaji pegawainya menjadikan alasan utama terjadinya pemutusan hubungan kerja. Oleh sebab itu, pengelola dituntut untuk jeli dalam menghadapi tantangan semacam ini.

Pelaku usaha sektor pariwisata mengalami kendala dalam pengelolaan wisata terlebih lagi saat pandemi Covid-19 melanda di penghujung tahun 2020. Dampak pandemi ini antara lain menyebabkan jumlah kunjungan wisata menurun, tempat wisata ditutup untuk sementara waktu sehingga berdampak terhadap penurunan penerimaan wisata

dan menurunnya aktivitas dalam pengelolaan wisata. Selain itu, pengelola wisata juga mengalami kendala dalam meningkatkan sarana dan prasarana wisata serta peningkatan SDM. Upaya yang dapat dilakukan ialah pengelola wisata harus lebih jeli dan meningkatkan inovasi dalam pengelolaan wisata. Diperlukan kerjasama dan komitmen antara pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensial daerah guna mengoptimalkan dan meningkatkan PAD.

Tantangan Pengembangan Sektor Pariwisata

Sebagian besar sektor penunjang ekonomi terkena dampak dari pandemi ini, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor penunjang ekonomi yang mengalami dampak yang signifikan. Pada sektor pariwisata adanya berbagai kebijakan penguncian wilayah negara atau *lockdown* dan pembatasan aktivitas sosial mengakibatkan terputusnya mata rantai industri pariwisata, antara lain: bisnis transportasi, perhotelan, tempat wisata, dan lainnya. Di sektor ekonomi kreatif berdampak antara lain industri hiburan, kuliner, usaha UMKM dan industri lainnya. Banyak pelaku usaha dari industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang tidak mampu bertahan karena mengalami penurunan pendapatan atau omzet secara drastis akibat menurunnya jumlah daya beli dari masyarakat. Fenomena yang muncul dari dampak pandemi tersebut mendorong industri pariwisata dan ekonomi kreatif harus optimis, semangat dan bangkit untuk menghadapi tantangan, membuka kesempatan/peleluang, melakukan percepatan inflasi dan transformasi dengan terus beradaptasi di masa dan pasca pandemi covid-19.

Dampak pandemi Covid-19 menjadikan tantangan tersendiri bagi sektor pariwisata untuk dapat bertahan. Diperlukan manajemen yang baik dari para pengelola setiap objek wisata. Berdasarkan penjelasan dari Bapak A dan Bapak T, ditemukan tantangan untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan, meliputi: 1) Semakin banyak pesaing baru yang muncul, yakni kemunculan objek wisata baru dan keberadaan *café* yang kian menjamur sehingga lebih menarik minat generasi muda; 2) Keterbatasan wahana, sarana, dan prasarana umum untuk menarik minat wisatawan, serta 3) Kebutuhan akan SDM yang kompeten, serta 4) Belum tersusunnya laporan keuangan yang memadai terkait pengelolaan wisata, serta 5) Faktor dana/anggaran. Tantangan semacam ini seharusnya dijadikan perhatian khusus oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Hal tersebut dikarenakan sektor pariwisata yang dapat menjadi potensi penggalan sumber pendapatan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan PAD yaitu dengan melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah. Intensifikasi yang dimaksud ialah mengkaji dan meningkatkan kegiatan yang tidak hanya di kabupaten Bangkalan namun juga di kabupaten lain wilayah Madura secara lebih mendalam. Tujuan dari intensifikasi tersebut tak lain agar dapat memperoleh dan mencapai hasil yang maksimal dalam kurun waktu yang ditentukan. Pada akhirnya, PAD diharapkan dapat menjalani perannya yakni mampu mendorong perekonomian dan menjamin kesejahteraan rakyat. Dari hasil pungutan pajak daerah tersebut, diharapkan mampu memperbaiki perekonomian dan dapat memberi peran untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab. Secara umum, kontribusi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Bangkalan cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 turut memberikan dampak yang signifikan, bahkan disaat pandemi Covid-19 mulai membaik di tahun 2021.

KESIMPULAN

Hasil analisis kontribusi dan efektivitas pajak dan retribusi daerah pada sektor pariwisata kabupaten Bangkalan selama tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi. Kontribusi pajak daerah sektor pariwisata secara keseluruhan sebesar 1,30% (kurang berkontribusi), sedangkan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar 0,12% (relatif tidak berkontribusi). Pajak daerah sektor pariwisata yang menyumbang kontribusi paling besar adalah pajak restoran dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,25%. Pajak hotel menjadi pajak daerah dengan kontribusi paling rendah, yaitu sebesar 0,03%. Pun demikian pada rata-rata efektivitas penerimaan sektor pariwisata Kabupaten Bangkalan tahun 2017-2021 berfluktuatif. Dampak pandemi Covid-19 menjadikan tantangan tersendiri bagi sektor pariwisata untuk dapat bertahan. Tantangan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan, meliputi: 1) Semakin banyak pesaing baru yang muncul; 2) Keterbatasan wahana, sarana, dan prasarana umum untuk menarik minat wisatawan, 3) Kebutuhan akan SDM yang kompeten, 4) belum tersusunnya laporan keuangan yang memadai terkait pengelolaan wisata, serta 5) Faktor dana/anggaran. Tantangan semacam ini seharusnya dijadikan perhatian khusus oleh pemerintah daerah. Sektor pariwisata yang dapat menjadi potensi penggalan sumber pendapatan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah. Salah satu upaya pemerintah

daerah untuk memaksimalkan kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan PAD yaitu dengan melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah. Intensifikasi yang dimaksud ialah mengkaji dan meningkatkan kegiatan yang ada di Kabupaten Bangkalan secara lebih mendalam agar dapat memperoleh dan mencapai hasil yang maksimal dalam kurun waktu yang ditentukan.

Penelitian ini berimplikasi pada beberapa hal. Pertama, menambah literatur dengan mengeksplorasi optimalisasi pajak daerah sektor pariwisata dari segi kontribusi dan efektivitasnya terhadap PAD. Selain itu, temuan penelitian mengenai tantangan dan strategi mengembangkan sektor pariwisata pada masa pandemi Covid-19, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan kegiatan dan program kepariwisataan guna membantu pemerintah dalam meningkatkan PAD. Kedua, penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan memperluas pemahaman area penelitian di negara berkembang. Penelitian ini hanya menganalisis optimalisasi pajak daerah dari sektor pariwisata (pajak hotel pajak restoran, pajak hiburan, serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga) saja. Perbedaan kondisi perekonomian tentunya juga akan mempengaruhi dampak yang nantinya akan ditimbulkan, sehingga penelitian lanjutan dapat membandingkan penerapan strategi ini pada beberapa wilayah dengan kondisi yang berbeda.

Ucapan Terimakasih

Penelitian ini didukung oleh LPPM Universitas Trunojoyo Madura dengan Hibah Riset Mandiri 2022, Nomor 271/UN46.4.1/PT.01.03/2022

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmar, Nurlinda, & Muhani, M. (2012). Peranan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota palopo. *Jurnal Equilibrium*, 2(1), 113–121.
- Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press
- Barrios, S., D'adria, D., & Gesualdo, M. (2020). Reducing tax compliance costs through corporate tax base harmonization in the European Union. *Journal of International Accounting, Auditing, & Taxation*, Vol. 41, DOI: 10.1016/j.intaccudtax.2020.100355
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Dewi, D. N., & Adi, S. W. (2021). Analisis Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2018). 702–711. *Prosiding Seminar Akuntansi dan Bisnis*, <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5226>
- Ernawaty. (2019). Manajemen Strategi Pengembangan Objek Wisata Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 55-58.
- Firdausy, C. (2017). *Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Harumdhani, N. (2012). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta Tahun 2009-2011 (Perbedaan Atas Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 Dan UU N0.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Khoir, F., Ani, H. M., & Hartanto, W. (2018). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2017. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 12(2), 199. <https://doi.org/10.19184/jpe.v12i2.8320>
- Kristianti, I., & Bala, M. (2019). Analisis Sektor Pariwisata Dalam Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Akuntansi*, 19(1), 35–46.
- Kurniawan, M. H., Ifa, K., & Wiyono, M. W. (2021). Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Lumajang) Tahun 2015-2019. *Counting: Journal of Accounting*, 3(3), 63–68.
- Masruroh, R., & Nurhayati, N. (2016). Strategi Pengembangan Parawisata Dalam Rangka Peningkatan Parawisata Di Kabupaten Kuningan. *Electronic Journal Politeknik Harapan Bersama Tegal*, 1(1), 124–133.
- Nawangsih, D. (2018). Kontribusi Retribusi Sektor Pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2016. *Universitas Negri Yogyakarta*, 3, 87.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan. (2020). Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035.

- Purwaningsih, N., & Sunaningsih, S. N. (2021). Analisis Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 471–478. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.892>
- Puspitasari, I., Saleh, M., & Yunitasari, D. (2018). Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Periode Tahun 2011-2015. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 5(1), 11. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7720>
- Sigle, Marteen A., Goslinga, S., Spekle, Roland F., & Hel, Licette E. J.C.M. (2022). The cooperative approach to corporate tax compliance: An empirical assessment. *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation*, Vol. 46, doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2022.100447
- Tarigan, S. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wicaksono, G. Puspita, Y. Asmandani, V. & Kusumaninhrum, N D. (2022). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Merespon Pandemi Covid-19 dan Dampaknya terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 86-92.
- Wulandari, D., & Priyastiwi, P. (2022). Analisis Retribusi Pariwisata Pantai Untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Gunungkidul Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 177–186. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i1.431>
- Yanti, N., & Hadya, R. (2018). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan PAD Kota Padang. *Jurnal Benefita*, 3(3), DOI: 10.22216/jbe.v3i3.3692.